



FITRA
Provinsi RIAU

2022

LAPORAN HASIL



**MONITORING DAN
EVALUASI CAPAIAN
SIKAS HIJAU
2019-2021**

**PENYUSUN;
Tim Sekretariat Siak Hijau**

Daftar Isi

KATA PENGANTAR

BAGIAN I : PENDAHULUAN

a. Latar Belakang	1
b. Tujuan Monitoring dan Evaluasi	2
c. Waktu dan Tahapan Monev	2
d. Ruang Lingkup Monev	3
e. Sasaran Monev	4

BAGIAN II: ARAH KEBIJAKAN SIAK HIJAU

a. Perkembangan Siak Hijau	5
b. Indikator Siak Hijau	7
c. Kelembagaan Siak Hijau	9

BAGIAN III: HASIL MONEV SIAK HIJAU

a. Dukungan Siak Hijau 2019-2021	9
b. Capaian Indikator Siak Hijau	15
c. Dukungan Kampung Terhadap Siak Hijau	19

BAGIAN IV: PENUTUP

a. Kesimpulan	21
b. Rekomendasi	22

Kata Pengantar

Alhamdulillah, Kebijakan Siak Hijau telah membawa dampak perbaikan terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Siak, bahkan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan lahan yang lestari. Sejak tahun 2018 yang lalu komitmen pembangunan lingkungan hidup sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2022 tentang Siak Hijau menjadi acuan para pihak dalam pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Siak. Pemerintah daerah sangat berterimakasih kepada semua pihak selama ini banyak membantu dan berkolaborasi dalam mewujudkan Siak Kabupaten Hijau. Tentunya hingga saat ini masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan Siak Hijau, melalui hasil monitoring dan evaluasi ini menjadi gambaran bagi kita semua untuk meningkatkan peran masing-masing dalam mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. **Drs. H. Alfedri, M.Si (Bupati Siak)**

Pembangunan Hijau merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dan daerah, Inisiasi Siak Hijau sejak tahun 2018 yang lalu merupakan praktek baik pemerintah daerah dalam pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan. Sejalannya pencapaian Siak Hijau saat ini sebagaimana hasil monev ini menunjukkan betapa pentingnya untuk melestarikan lingkungan hidup, apalagi secara manfaatnya tidak hanya untuk perlindungan hidup tetapi juga berdampak pada pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat terutama bagi masyarakat kampung yang berada dikawasan dan sekitaran hutan. Tim Koordinasi Siak Hijau dalam memastikan tercapainya tujuan Siak Hijau terus melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan para pihak terutama kepada para pemangku kepentingan di Kabupaten Siak, Pemerintah Provinsi dan Nasional. **Dr. Fauzi Asni, M.Si (Ketua Tim Koordinasi Siak Hijau)**

Bagi Pemerintah Kabupaten Siak, dengan disahkannya Perda No. 4 Tahun 2022 tentang Siak Kabupaten Hijau semakin mempertegas komitmen untuk mendukung pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang sebelumnya kebijakan Siak Hijau diatur melalui Peraturan Bupati. Dalam perjalanannya, implementasi Siak Hijau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah, diperlukan dukungan dan kerjasama para pihak baik NGO, privat sektor maupun pemerintah kampung di Kabupaten Siak. Kedepan agar dukungan para pihak semakin terkonsolidasi semakin efektif maka melalui peran Sekretariat Siak Hijau akan memfasilitasi semua pihak yang akan terlibat untuk mendukung Siak Hijau, sekaligus untuk mengukur capaian Siak hijau sebagaimana saat ini sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pencapaian Siak Hijau sebelumnya. **Dr. Wan Muhammad Yunus, MT (Kepala Sekretariat Siak Hijau)**

Selama ini peran masyarakat cukup besar terhadap keberlangsungan pembangunan lingkungan hidup, Tentunya NGO yang tergabung dalam forum Sedagho Siak sangat mengapresiasi pemerintah Kabupaten Siak terhadap komitmen Siak Hijau dan terus mendukung untuk memastikan kolaborasi dalam pembangunan lingkungan terus berjalan. Sampai saat ini terdapat 21 lembaga yang melaksanakan program di Siak untuk mendukung Siak Hijau, kedepan tentunya akan lebih banyak lagi kontribusi dari NGO baik itu dukungan program dan kegiatan maupun dukungan anggaran untuk Siak Hijau. Hasil monev Siak Hijau ini akan menjadi evaluasi kedepannya supaya dukungan dari NGO untuk Siak Hijau semakin terkonsolidasi dan terkoordinasi yang difasilitasi oleh Sekretariat Siak Hijau. **Tomi Tamzil (Dinamisator Sedagho Siak)**

Upaya untuk mewujudkan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan sudah menjadi kewajiban bagi privat sektor, sesuai amanat UU PPLH bahwa pelestarian lingkungan hidup menjadi mutlak yang harus dipatuhi oleh perusahaan baik itu dibidang kehutanan, perkebunan maupun pertambangan. Dalam konteks lokal Kabupaten Siak melalui kebijakan Siak hijaunya maka semakin memperkuat bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Siak untuk mematuhi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Hasil monev Siak Hijau ini kami sadari belum semua perusahaan swasta melaporkan kegiatannya, dan melalui koalisi privat sektor (KPSSH) menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antar pelaku usaha untuk terlibat dalam mendukung Siak Hijau kedepan. **Khaerul Basyar S.Hut, MSi. (Ketua Koalisi Privat Sektor untuk Siak Hijau)**

Bagian I; Pendahuluan

A. Latar Belakang

Isu Siak Hijau pertama kali bergulir di diskusikan di Kabupaten Siak sejak tahun 2016, komitmen tersebut kemudian baru terealisasi pada tahun 2018 melalui Penetapan Peraturan Bupati Siak No. 22 Tahun 2018 tentang Siak Kabupaten Hijau. Secara umum kebijakan Siak Hijau didorong bertujuan untuk menyelaraskan antara upaya penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup dengan manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam, yang tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Sejak berlakunya kebijakan Siak Hijau pada tahun 2018, hingga tahun 2021 sebagai tahun terakhir pelaksanaan rencana aksi roadmap Siak hijau, belum ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengukur capaian kinerja Siak Hijau, serta kontribusi para pihak dalam mendukung implementasi Siak hijau. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Siak perlu melakukan pendataan capaian Siak hijau dalam empat tahun terakhir (2018-2021) menjadi dasar atau baseline pembangunan lingkungan hidup untuk selanjutnya.

Selama ini pelaksanaan Siak Hijau masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi antara para pihak, sesungguhnya implementasi Siak Hijau tersebut dimandatkan kepada banyak pihak seperti pemerintah daerah terdiri dari 11 OPD, mitra pembangunan terdapat 20 lembaga CSO/NGO dan privat sektor. Sehingga dalam pelaksanaan Siak Hijau tersebut belum terkoordinasi dan bahkan banyak program kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung Siak Hijau tidak terpublikasi dengan baik.

Dalam perkembangannya hingga saat ini, kebijakan siak hijau telah di tingkatkan dalam kebijakan peraturan daerah yaitu Perda No. 4 Tahun 2022 Tentang Siak Hijau, dan juga telah terbentuk sekretariat Tim Koordinasi Siak Hijau (TKSH). Dengan demikian, kedepannya implementasi Siak Hijau semakin terkoordinir dan dapat diukur terkait capaian dan kontribusi para pihak dalam mendukung kebijakan Siak Hijau.

Bahkan melalui kebijakan jangka menengah daerah RPJMD Siak Tahun 2021-2026, Arah kebijakan Siak Hijau secara ekplisit dimasukkan dalam misi kelima yaitu mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan atau Siak Hijau. Untuk mencapai misi tersebut, terdapat dua sasaran utama, diantaranya; peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dan penurunan tingkat kebakaran hutan dan lahan.

Untuk mengukur capaian keberhasilan kebijakan Siak Hijau tersebut, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan implementasi Siak Hijau sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 sesuai batas waktu pelaksanaan roadmap atau peta jalan Siak Kabupaten Hijau. Melalui instrument monitoring dan evaluasi ini nanti sebagai acuan pemerintah daerah dan Stakeholder terkait untuk mengukur capaian Siak Kabupaten Hijau, baik yang telah dilakukan maupun untuk pelaksanaan Siak Hijau kedepan.

Untuk mengukur capaian keberhasilan kebijakan Siak Hijau tersebut, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan implementasi Siak Hijau sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 sesuai batas waktu pelaksanaan roadmap atau peta jalan Siak Kabupaten Hijau. Melalui instrument monitoring dan evaluasi ini nanti sebagai acuan pemerintah daerah dan Stakeholder terkait untuk mengukur capaian Siak Kabupaten Hijau, baik yang telah dilakukan maupun untuk pelaksanaan Siak Hijau kedepan.

B. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

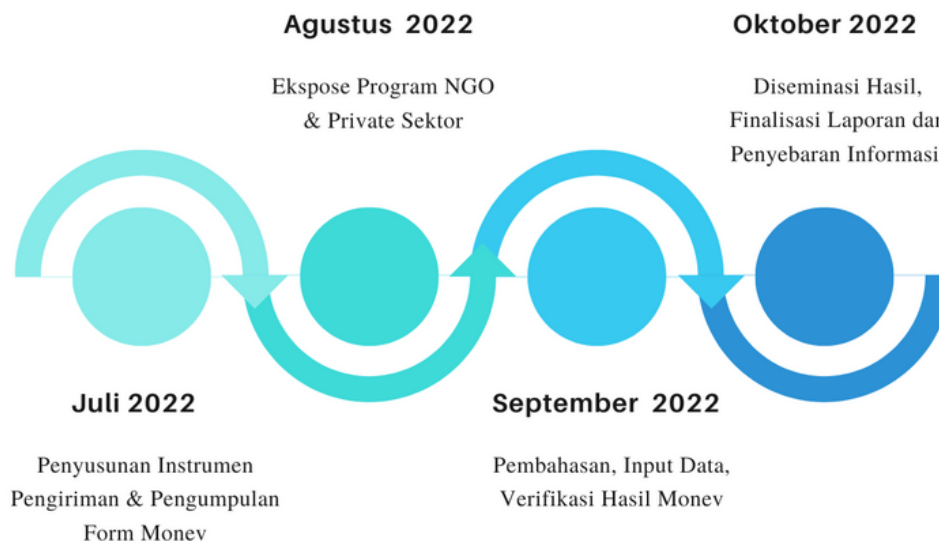
Secara umum tujuan monev Siak hijau adalah untuk melihat sejauh mana keberhasilan implementasi Siak Hijau terhadap upaya perbaikan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama yang berdampak langsung dari aktifitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Kabupaten Siak.

Secara khusus, tujuan monev implementasi kebijakan siak hijau adalah untuk;

- Mengukur capaian kinerja Siak Kabupaten Hijau berdasarkan peta jalan Siak Hijau dari tahun 2018-2021, pada dua aspek yaitu upaya penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup dan peningkatan ekonomi;
- Menyusun baseline data kinerja Siak Hijau melalui identifikasi kebijakan, program kegiatan dan dukungan anggaran yang mendukung implementasi Siak Hijau;
- Melakukan pemetaan para pihak yang berkontribusi dalam mendukung implementasi kebijakan Siak Hijau;

C. Waktu dan Tahapan Monev

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Capaian Siak Hijau pada periode 2019-2021, dilaksanakan selama empat bulan terhitung sejak bulan Juli- Oktober 2022, dengan tahapan sebagai berikut;



D. Ruang Lingkup Monev

Melalui tiga pendekatan implementasi kebijakan Siak Hijau terdiri dari tiga pendekatan yaitu; pendekatan kebijakan, pendekatan lanscape dan pendekatan ekonomi. Maka ruang lingkup monitoring dan evaluasi Kinerja Siak Hijau berdasarkan input, output, outcome sesuai roadmap Siak Kabupaten Hijau, meliputi;

i. Aspek Kebijakan

Pada aspek kebijakan ini yang perlu dilakukan evaluasi untuk mengukur kebijakan apa saja yang telah dibuat dalam rangka mendukung implementasi Siak Hijau, baik yang dilahirkan oleh pemerintah daerah maupun kebijakan yang dibuat oleh para pihak yang terkait dalam pencapaian Siak hijau. yaitu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan apa saja yang telah dilahirkan oleh pemerintah daerah, OPD terkait dalam rangka untuk mendukung implementasi dari tahun 2018-2021. Kebijakan tersebut dapat dikategorikan berdasarkan jenis kebijakan yang ada, seperti; Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Dinas/OPD terkait, Kerjasama (MoU) para pihak terkait, dan Kebijakan lainnya yang relevan mendukung Siak Hijau.

ii. Program dan Kegiatan

Pada aspek program dan kegiatan yang akan dievaluasi adalah dukungan para pihak terhadap implementasi Siak Hijau dalam bentuk program kegiatan yang dilakukan dalam empat tahun terakhir dari tahun 2018-2021, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui OPD terkait dan mitra pembangunan (CSO/NGO) yang tergabung dalam koalisi Sedagho Siak.

iii. Anggaran

Dukungan anggaran menjadi faktor utama yang mendukung pencapaian tujuan Siak Hijau. Implementasi Siak Hijau sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 sesungguhnya telah banyak upaya yang dilakukan para pihak termasuk dukungan anggaran untuk Siak Hijau. Kedepannya, agar kebutuhan pembiayaan dalam mendukung implementasi Siak Hijau dapat terukur secara efektif dan efisien, maka perlu melakukan evaluasi dan monitoring terkait dukungan anggaran yang telah dilakukan para pihak dalam mengimplementasikan kebijakan Siak Hijau.

Dalam proses pengumpulan data terkait kebijakan, program kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan oleh para pihak dan pemangku kepentingan. Maka tim koordinasi Siak Hijau dapat melakukan koordinasi, komunikasi dan diskusi langsung dengan para pihak dalam rangka untuk pendataan capaian Siak Hijau.

E. Sasaran Monitoring

Monitoring dan evaluasi capaian Siak Hijau dilakukan terhadap pihak-pihak yang dimandatkan untuk melaksanakan rencana aksi Siak Hijau sesuai Keputusan Bupati Siak No. 650 tentang Roadmap Siak Hijau, adapun para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Siak Hijau terdiri dari unsur pemerintah daerah, NGO dan privat sektor, sebagai berikut;

Tabel 1; Sasaran Monitoring dan Evaluasi Siak Hijau

Unsur Pemerintah Daerah	Unsur NGO	Unsur Privat Sektor
<ul style="list-style-type: none">• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)• Dinas Lingkungan Hidup• Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Fitra Riau• Perkumpulan Elang• Jikalahari• Walhi Riau• Yayasan Mitra Insani• TERAS RIAU• Kaliptra Andalas• RWWG	<ul style="list-style-type: none">• PT. RAPP,• PT. Arara Abadi,• Sinas Mas,• Musimas,• Wilmar

<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian/perkebunan • Dinas Perikanan dan Peternakan • Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Koperasi & UMKM • Dinas Penanaman Modal dan PTSP • Dinas Pariwisata • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Ketahanan Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • JMGR • LPESM • SENDS • YEZ • Winrock Inter • LTKL • Econusantara • SPKS • Madani • Greenpeace • Koaksi Indonesia • Rainforest Alliance; 	
---	--	--

Bagian 2; Arah Kebijakan Siak Hijau

A. Perkembangan Siak Hijau

Berdasarkan identifikasi isu-isu strategis daerah dalam kebijakan jangka menengah daerah, permasalahan lingkungan hidup masih terus terjadi seperti kebakaran hutan dan lahan, kerusakan gambut dan mangrove masih mendominasi terjadi di Kabupaten Siak. Artinya, dengan kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan Siak Hijau belum tercapai sepenuhnya hingga tahun 2021 yang merupakan tahun terakhir rencana aksi Siak Hijau. Kondisi Pandemi sangat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak pada menurunnya sejumlah pendapatan daerah. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa program prioritas daerah tidak dapat dilaksanakan, termasuk program kegiatan yang mendukung pencapaian Siak Hijau.

Kemudian melalui kebijakan RPJMD Siak Tahun 2021-2026, arah pembangunan Siak Hijau lebih konkrit telah dimasukkan dalam salah satu misi Bupati Siak yaitu misi ke lima “pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan atau Siak Hijau”, terdapat dua sasaran yaitu 1) meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup, dan 2) menurunnya tingkat kebakaran hutan dan lahan. Secara lebih rinci, strategi dan arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup yang mendukung Siak Hijau, diuraikan dalam tabel berikut ini;

Tabel 2; Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Tahun 2021-2026

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pengendalian pemanfaatan ruang
	Peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau	Menyediakan ruang terbuka hijau
	Peningkatan pengelolaan, air limbah, persampahan dan lingkungan hidup	Menambah penyediaan IPAL komunal
		Menyediakan Tempat Pembuangan Sampah
		Menurunkan Indeks Pencemaran air dan udara
Pelaksanaan Transfer Anggaran yang Pro Lingkungan	Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE)	
Menurunnya tingkat kebakaran lahan dan hutan	Pemasyarakatan teknik ramah lingkungan dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan	Meningkatkan sosialisasi teknik ramah lingkungan dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan
	Peningkatan partisipasi multipihak dalam mengatasi kebakaran lahan dan hutan.	Meningkatkan koordinasi multi pihak dalam mengatasi kebakaran lahan dan hutan

Sumber; RPJMD Siak 2021-2026

Kedepannya, sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan Siak Hijau, harus mengacu pada tiga pendekatan pembangunan, yaitu; 1) pendekatan kebijakan yaitu mengarahkan semua kebijakan daerah dapat mendukung Siak Hijau, 2) Pendekatan Landscape dan Pengelolaan Terbaik yaitu dengan cara mendorong inisiatif-inisiatif pengelolaan SDA secara berkelanjutan dan ramah lingkungan; dan 3) Pendekatan Ekonomi yaitu memberi ruang partisipasi dan memfasilitasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan SDA yang mendapatkan manfaat ekonomi.

B. Indikator Siak Hijau

Berdasarkan Peta Jalan/Roadmap Siak Kabupaten Hijau, terdapat lima sasaran dan indikator untuk pencapaian tujuan Siak Hijau, diuraikan dalam tabel berikut ini.

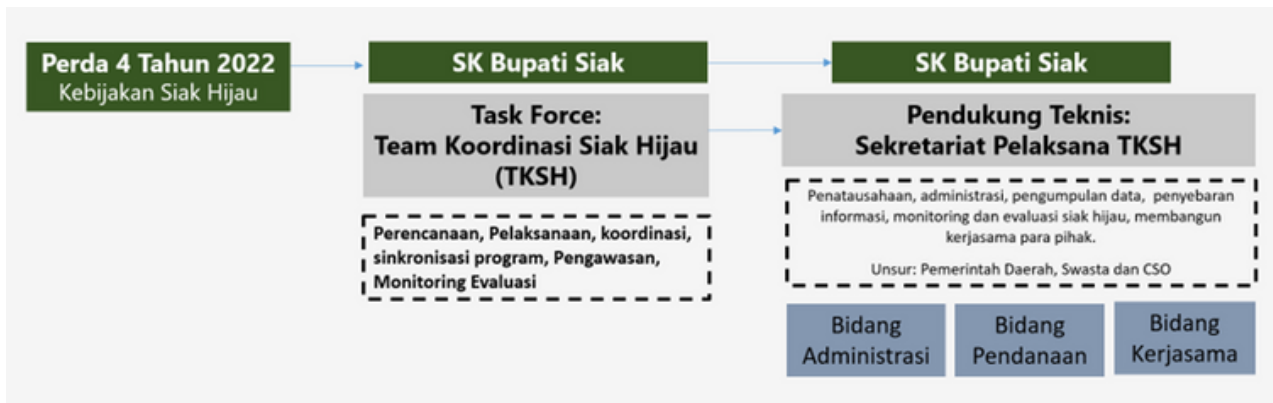
Tabel 3; Sasaran dan Indikator Siak Hijau Tahun 2019-2021

Sasaran	Indikator
Menurunnya tingkat kerusakan sumber daya alam khususnya gambut dan DAS Siak	<ul style="list-style-type: none"> • Zero Karhutla sampai dengan tahun 2021 • Tidak ada alih fungsi gambut untuk HTI dan Perkebunan Besar • Menurunkan emisi GRK pada lima sektor prioritas (sektor kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah) sebesar 22,7% dari tahun 2015 • Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) < 100 sampai dengan tahun 2022 • Perbaikan Sungai Siak menuju batas baku mutu s/d 2021 (pH, BOD, COD, Co, H2S) • Berkurangnya kasus perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Siak sampai dengan 50%
Pemanfaatan SDA dengan mengurangi dampak kerusakan terhadap fungsi dan keberlanjutan sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkebunan yang memperoleh sertifikat ISPO sebesar 100% tahun 2021 • Terlindunginya zona tanaman pangan seluas 9197,69 ha di Kec. Bunga Raya, Sungai Mandau, Sungai Apit dan Sabak Auh • Peningkatan produksi tanaman pangan melalui Intensifikasi dengan penerapan BMP sebesar 20% s/d 2021

	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan komitmen No Deforestasi, No Peat, dan No Exploitation (NDPE) dalam pemanfaatan SDA di area konsesi HTI, HGU dan Tambang • Ada Kebijakan pengembangan HHBK, Jasa Lingkungan dan RP Ekowisata di Ekosistem TN Zamrud dan SM Giam Siak Kecil
<p>Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pedesaan, Pembangunan sector ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kemiskinan menurun sebesar 6% hingga tahun 2021; • Bertambahnya BUMKAM (Badan Usaha Milik Kampung) yang memiliki unit usaha berdasarkan potensi kampung; • Jumlah pengembangan produk unggulan kampung one villages one product; • Jumlah industri Hilir yang dikembangkan pada sektor pertanian dan perkebunan; • Jumlah pembangunan kawasan pedesaan berdasarkan potensi SDA di tingkat kampung, 1 kawasan per kecamatan
<p>Pola Pemanfaatan Sumber Daya Alam daerah dilakukan melalui kegiatan Konservasi, Hilirisasi dan Intensifikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bertambahnya rasio ruang terbuka hijau di perkotaan dan perkampungan • Meningkatnya akses dan penguasaan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan seluas 9.618,52 ha untuk Indikatif TORA dan 115,568,6 ha untuk Indikatif PIAPS • Pengembangan Kota Hijau di 4 kecamatan (Siak, Kandis, Minas, dan Perawang) • Meningkatnya jumlah industri hilir untuk mendukung pengembangan hilirisasi SDA yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan Kabupaten Hijau
<p>Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bertambahnya rasio ruang terbuka hijau di perkotaan dan perkampungan • Pengembangan Kota Hijau di 4 kecamatan (Siak, Kandis, Minas, dan Perawang) • Meningkatnya jumlah industri hilir untuk mendukung pengembangan hilirisasi SDA yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan Kabupaten Hijau

C. Kelembagaan Siak Hijau

Untuk mendukung pencapaian tujuan Siak Hijau, sesuai mandat Perda No. 4 Tahun 2022 tentang Siak Kabupaten Hijau, pemerintah daerah telah membentuk unit kerja khusus yang akan menjalankan kebijakan Siak Hijau yaitu Tim Koordinasi Siak Kabupaten Hijau (TKSKH), Selanjutnya untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antar tim maka dibentuk tim teknis dan sekretariat tim Koordinasi Siak Hijau yang berkedudukan di kantor Bappeda Siak.



Bagian 3; Hasil Monitoring Siak Hijau

A. Dukungan Siak Hijau 2019-2021

Secara umum rencana aksi Siak Hijau terlaksana dengan baik sejak diterbitkan kebijakan Siak Hijau pada tahun 2018, hingga berakhirnya pelaksanaan Siak hijau sampai tahun 2021 capaian Siak hijau diukur dengan empat kategori yang dilaksanakan di daerah yaitu; kebijakan, Program dan kegiatan, capaian indikator dan dukungan anggaran yang mendukung implementasi Siak Hijau baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maupun dukungan dari mitra pembangunan. Capaian Siak Hijau dari tahun 2019-2021 diuraikan sebagai berikut;

1. Kebijakan Pendukung Siak Hijau

Komitmen pemerintah Kabupaten Siak terhadap pembangunan lingkungan hidup tertuang kedalam kebijakan-kebijakan yang relevan mendukung pencapaian Siak Hijau, adapun kebijakan yang telah diterbitkan sejak tahun 2018, diantaranya;

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak 2021-2026, melalui misi kelima; mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Siak Kabupaten Hijau;
- Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat;
- Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Siak Kabupaten Hijau;
- Peraturan Bupati Nomor 136 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah Rumah Tangga;
- Peraturan Bupati Nomor 103 tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
- Peraturan Bupati Siak Nomor 37 tahun 2014 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Surat Keputusan Bupati Nomor 288 tahun 2014 tentang Pembentukan Satgas Operasi Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Surat Keputusan Bupati Siak No.650 tahun 2019 tentang Peta Jalan Siak Kabupaten Hijau;
- Keputusan Bupati Siak No. 519 tahun 2022 Tentang Tim Koordinasi Siak Kabupaten Hijau;
- Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) melalui Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;

2. Dukungan Program dan Kegiatan Para Pihak

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan para pihak untuk mendukung implementasi Siak Hijau dapat diidentifikasi berdasarkan pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan pencapaian Siak Hijau. Dalam periode 2019-2021 dukungan Program/kegiatan yang relevan dengan Siak Hijau telah banyak dilakukan baik terdapat pada OPD pemerintah daerah maupun dukungan dari NGO dan privat sektor yang telah berkomitmen untuk mendukung Siak Hijau. adapun dukungan program/kegiatan para pihak diuraikan dalam tabel dibawah ini;

Tabel 3; Sasaran dan Indikator Siak Hijau Tahun 2019-2021

Sasaran Siak Hijau	Program /Kegiatan mendukung Siak Hijau		
	Pemda Siak	NGO/CSO	Privat Sektor
Menurunnya tingkat kerusakan sumber daya alam khususnya gambut dan DAS Siak	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penanggulangan Bencana • Program penanggulangan kebakaran dan non kebakaran • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Pengelolaan persampahan • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati • Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA) • Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH • Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pemadaman kebakaran hutan dan lahan; (Core) • Demplot Gambut berkelanjutan – Kampung Berbari, Dayun (ELANG) • Demplot Gambut berkelanjutan – Bunsur (WINROCK) • Dukungan pengelolaan gambut berkelanjutan di Kampung Dayun (ECO NUSANTARA) • Pantau gambut di Kab. Siak (KALIPTRA) • Pembangunan 2 demplot paludikultur di lahan gambut; (CORE) • Penelitian Sawit berkelanjutan (MADANI) • Penanaman Mangrove – Sei. Apit (Jikalahari) • Penanaman mangrove di 6 Desa di Kec. Sei Apit (SENDS) • Investigasi ilegal logging (JIKALAHARI) • Pengelolaan Sampah plastik di Kab. Siak di Kec. Bunga Raya, Tualang, Siak (WALHI) • Insentif Kinerja Aspek Perlindungan Lingkungan Hidup – TAKE Siak Hijau (Fitra Riau) 	<ul style="list-style-type: none"> • Fire Free Village Program; Pemberdayaan MPA dan Deteksi menyeluruh & sistem peringatan dini (PT. RAPP) • Desa Makmur Peduli Api (APP-Sinar mas) • Mengukur emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan GRK flux tower (PT. RAPP) • Penggunaan bahan bakar terbarukan (biodiesel) untuk transportasi, penggunaan Hybrid solar cell - diesel genset untuk operasional estate (PT. RAPP) • Program Restorasi Ekosistem di lanscape Semenanjung Kampar, Riau (PT. RAPP) • Menerapkan pendekatan production-protection dalam pengelolaan ekosistem gambut (PT. RAPP)

			<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengukuran subsidensi gambut, dan tinggi muka air tanah pada berbagai landuse (hutan sekunder, lahan gambut terdegradasi) (PT. RAPP) • Upaya penyelesaian konflik tanah (Sinasmas)
<p>Pemanfaatan SDA dengan mengurangi dampak kerusakan terhadap fungsi dan keberlanjutan sumber daya alam</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan sertifikasi RSPO di Koto Ringin dan Benteng Hulu; (WRI) • Perhutanan Sosial - Locus; Kampung Dosan, Dayun (ELANG) • Perhutanan Sosial - Locus; Tl. Lanus dan RMJ (YMI) • Mendorong perhutsos di kampung RMJ dan Penyengat (JMGR) • Usulan perhutsos di Kampung Dosan RWWG) • Monitoring deforestasi bersama pemda Siak (WRI) • Kajian HHBK di TN Zamrud (Teras Riau) • Pengelolaan TN Zamrud (YEZ) • Identifikasi HHBK di TN Zamrud (SART) • Penyusunan RPJP TN Zamrud (ELANG) • Forest Art TN Zamrud (JIKALAHARI) • PLUP (Participatory Land Use Planning) (Earthworm) 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan tata kelola petani sawit di 5 (lima) desa bersama Para Pihak dengan Pemerintah Kabupaten Siak (Wilmar) • Program Pengembangan Petani Swadaya Kelapa Sawit (Pelatihan dan pendampingan, Leaf Sampling Unit (LSU), dan Sertifikasi RSPO bagi Petani Swadaya) - (Musim Mas) • Integrated Farming System (IFS), Pendampingan dan pembinaan, Pelatihan keterampilan usaha tani yang berkelanjutan dan • Bantuan bahan pertanian (PT. RAPP) • Pengelolaan lahan gambut berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan, menerapkan BMP (Best Management Practices) - PT. RAPP

			<ul style="list-style-type: none"> Implementasi kebijakan NDPE dan dukungan kepada Kabupaten Siak dan melaksanakan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon-Indonesia (LCDI) dan SDGs (Wilmar)
Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pedesaan, Pembangunan sector ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan.	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan dan Pembinaan BUMKAM Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan ekonomi masyarakat dan kelompok perempuan – Kampung; Bukit Harapan, Temusai dan Dusun Pusaka (LPESM) Pemberdayaan ekonomi di 10 Kampung Kec. Bunga Raya (TERAS RIAU) Pemberdayaan kelompok perempuan – di Kampung Kayu Ara Permai dan Sungai Kayu Ara (RWWG) Praktek pertanian baik dan berkelanjutan; (CORE) Insentif Kinerja Aspek Ekonomi - TAKE SIAK HIJAU (Fitra Riau) Pendampingan terhadap diversifikasi produk berbasis nenas di Desa Mengkapan, Kec. Sungai Apit (CORE) 	<ul style="list-style-type: none"> Program pengelolaan lingkungan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Kuala Gasib, Teluk Rimba, Buatan 1, Pkl. Pisang (PT. KTU - Astra) Program pengembangan UMKM di 21 desa dan kecamatan di Kabupaten Siak berupa pelatihan dan pendampingan (PT. RAPP) Program pengembangan usaha kegiatan perkebunan nanas di Desa Penyengat Kabupaten Siak (OVOP) PT. RAPP
Pola Pemanfaatan Sumber Daya Alam daerah melalui kegiatan Konservasi, Hilirisasi dan Intensifikasi.	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan keanekaragaman Hayati (KEHATI) 	<ul style="list-style-type: none"> Kajian Pengelolaan Tora di Kab. Siak (WALHI) Membangun kelembagaan pengelola TORA di Kampung Dusun Pusaka (TERAS RIAU) 	<ul style="list-style-type: none"> N/a

		<ul style="list-style-type: none"> • Promosi dan komunikasi pembangunan ekonomi pusaka lestari (SKELAS) • Sebagai incubator akselerator dan agregator UMKM (SKELAS) 	
Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • N/a 	<ul style="list-style-type: none"> • Sawit dalam kawasan hutan – seluruh kampung (ELANG) • Pemetaan Sawit smallholder (SPKS) • Pendataan perkebunan sawit untuk STDB (WRI) 	<ul style="list-style-type: none"> • N/a

3. Dukungan Anggaran Siak Hijau

Melalui monev Siak Hijau juga melakukan identifikasi dukungan anggaran yang relevan mendukung Siak Hijau, dari hasil monev ini dapat diidentifikasi bahwa dukungan anggaran untuk pencapaian Siak Hijau baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun dukungan dari NGO dan privat sektor. Oleh karena keterbatasan data yang dikumpulkan terkait dukungan anggaran yang dapat teridentifikasi secara akuntabel hanya terdapat pada pemerintah daerah khususnya pada 11 OPD yang relevan yaitu berjumlah Rp. 79,8 Milyar. Sedangkan dukungan anggaran dari para pihak belum melaporkan cerara akuntabel. Adapun dukungan anggaran untuk Siak Hijau diuraikan pada masing-masing sasaran Siak Hijau, sebagai berikut;

Tabel 3; Sasaran dan Indikator Siak Hijau Tahun 2019-2021

Sasaran Siak Hijau	Dukungan Anggaran Tahun 2021		
	Pemda Siak (OPD Terkait)	NGO/CSO	Privat Sektor
Menurunnya tingkat kerusakan sumber daya alam khususnya gambut dan DAS Siak	Rp. 66.979.644.469	N/a	N/a

Pemanfaatan SDA dengan mengurangi dampak kerusakan terhadap fungsi dan keberlanjutan sumber daya alam	Rp. 1.331.722.260	N/a	N/a
Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pedesaan, Pembangunan sector ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan	Rp. 42.260.000	N/a	N/a
Pola Pemanfaatan Sumber Daya Alam daerah melalui kegiatan Konservasi, Hilirisasi dan Intensifikasi.	Rp. 10.146.946.500	N/a	N/a
Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan	N/a	N/a	N/a
Total Dukungan	Rp. 79.832.295.489	N/a	N/a

B. Capaian Indikator Siak Hijau

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian Kebijakan Siak Hijau sejak tahun 2018-2021, secara umum implementasi rencana aksi Siak Hijau telah dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat dalam Siak Hijau. Dari lima sasaran Siak Hijau sebagaimana yang ditetapkan dalam peta jalan Siak Hijau, sebagian besar telah terlaksana, namun ada beberapa rencana aksi yang tidak dilaksanakan hingga akhir tahun 2021, hal ini disebabkan sebagian rencana aksi Siak Hijau tersebut bukan kewenangan pemerintah Kabupaten Siak. Secara lebih rinci capaian indikator Siak Hijau diuraikan pada masing-masing sasaran Siak Hijau, sebagai berikut;

Sasaran 1; Menurunnya tingkat kerusakan sumber daya alam khususnya gambut dan DAS Siak

Indikator	Data	Capaian Akhir- 2021
Zero Karhutla sampai dengan tahun 2021	luasan karhutla (hektar)	126,7 hektar

Tidak ada alih fungsi gambut untuk HTI dan Perkebunan Besar	Kondisi luas (data spasial 2018-2021) tutupan hutan	N/a
Menurunkan emisi GRK pada lima sektor prioritas sebesar 22,7% dari tahun 2015	Data Emisi 2015 dan kondisi emisi 2021	384.651 (GgCO ₂ -e)
Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) <100 sampai dengan tahun 2022	Data ISPU 2018 -2022 (DikPLHD)	83,07 (pm 10) 44,33 (pm 2,5)
Perbaikan Sungai Siak menuju batas baku mutu s/d 2021 (pH, BOD, COD, Co, H ₂ S)	Indeks Kualitas Air Sungai Siak (DikPLHD)	NH ₃ 2,10 Mg/L, H ₂ S 0,095 Mg/L, Detergen 40,2 Mg/L, Klorin 0,37 Mg/L, NO ₂ 0,114 Mg/L, NO ₃ 5,54 Mg/L
Berkurangnya kasus perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Siak sampai dengan 50%	Data kasus perusakan lingkungan hidup (laporan kasus);	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sampah (2 kasus) • Karhutla (1 kasus) • Kebun illegal (2 kasus) • Konflik Lahan (6 kasus) • Pencemaran sungai (7 kasus) • Pencemaran udara (2 kasus)

Sasaran 2; Pemanfaatan SDA dengan mengurangi dampak kerusakan terhadap fungsi dan keberlanjutan sumber daya alam

Indikator	Data	Capaian Akhir- 2021
Jumlah perkebunan yang memperoleh sertifikat ISPO sebesar 100% tahun 2021	Data penerima ISPO/RSPO	Jumlah ISPO 8, Jumlah RSPO 3, Total Luasan 2.600,63 ha
Terlindunginya zona tanaman pangan seluas 9.197,69 ha di Kec. Bunga Raya, Sungai Mandau, Sungai Apit dan Sabak Auh	Data luas zona tanaman pangan Siak	Luas Sawah Eksisting 4.899 hektar; <ul style="list-style-type: none"> - Bunga Raya 2,336 ha - Sei. Mandau 645 ha - Sei Apit 671 ha - Sabak Auh 1,247 ha

Peningkatan produksi tanaman pangan melalui Intensifikasi dengan penerapan BMP sebesar 20% s/d 2021	Data produksi tanaman pangan	N/a
Menerapkan komitmen No Deforestasi, No Peat, dan No Exploitation (NDPE) dalam pemanfaatan SDA diareal konsesi HTI, HGU dan Tambang	Komitmen NDPE yang dijalankan Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Ekawana Lestari Darma (menanam akasia diareal gambut lindung dan PIPIB, menanam diareal Piaps, menanam diluar izin) • PT. Balai Kayang Mandiri (menggusur sawit rakyat seluas 40 ha, membuka lahan baru aksia digambut dalam diatas 3 meter) • PT. Rimba Mandau lestari (membuka lahan baru akasia di gambut dalam diatas 3 meter)
Ada Kebijakan pengembangan HHBK, Jasa Lingkungan dan RP Ekowisata di Ekosistem TN Zamrud dan SM Giam Siak Kecil	Dokumen kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Kebijakan

Sasaran 3; Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pedesaan, Pembangunan sector ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan.

Indikator	Data	Capaian Akhir- 2021
Angka kemiskinan menurun sebesar 6%	Angka kemiskinan (Persentase) Data BPS	5,18 %
Bertambahnya BUMKAM (Badan Usaha Milik Kampung) yang memiliki unit usaha berdasarkan potensi kampung	Jumlah BUMKAM berbasis potensi Kampung	<p>Terdapat 78 usaha produktif dari 67 BUMKAM;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 67 BUMKAM Usaha produktif, • 55 BUMKAM Usaha Ritel, simpan pinjam
Jumlah pengembangan produk unggulan kampung one villages one product	Data produk; One Village one product	Terdapat 4 produk desa dari usaha BUMKAM di 4 Desa

Jumlah industri Hilir yang dikembangkan pada sektor pertanian dan perkebunan	Data industri hilir pertanian dan perkebunan	N/a
Jumlah pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan potensi SDA di tingkat kampung, 1 kawasan per kecamatan	Data kawasan perdesaan	Proses MoU dengan BRGM untuk pengelolaan KHG di Siak

Sasaran 4; Pola Pemanfaatan Sumber Daya Alam daerah dilakukan melalui kegiatan Konservasi, Hilirisasi dan Intensifikasi.

Indikator	Data	Capaian Akhir- 2021
Bertambahnya rasio ruang terbuka hijau di perkotaan dan perkampungan	Data Luasan RTH (hektar)	Eksisting 11.234 ha
Meningkatnya akses dan penguasaan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan	PIAPS 2015; 115,568,6 ha Indikatif TORA 9.618,52 ha	<ul style="list-style-type: none"> Perhutsos 8,016 ha (HD 7,013 ha, HKM 1,003 ha) Tora 10.000 ha (eks PT. MEG)
Pengembangan Kota Hijau di 4 kecamatan (Siak, Kandis, Minas, dan Perawang)	RTH Kecamatan	N/a
Meningkatnya jumlah industri hilir untuk mendukung pengembangan hilirisasi SDA yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan Kabupaten Hijau	Data Pengembangan Industri hilir	N/a

Sasaran 5; Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan

Indikator	Data	Capaian Akhir- 2021
Penurunan rasio gap akses dan penguasaan terhadap sumberdaya alam;	Perbandingan penguasaan lahan antara Perusahaan dan Rakyat (Data RPJMD)	<ul style="list-style-type: none"> HTI 329.110,22 ha Perkebunan swasta 238,550,95 ha Perkebunan Rakyat 76,895,20 ha

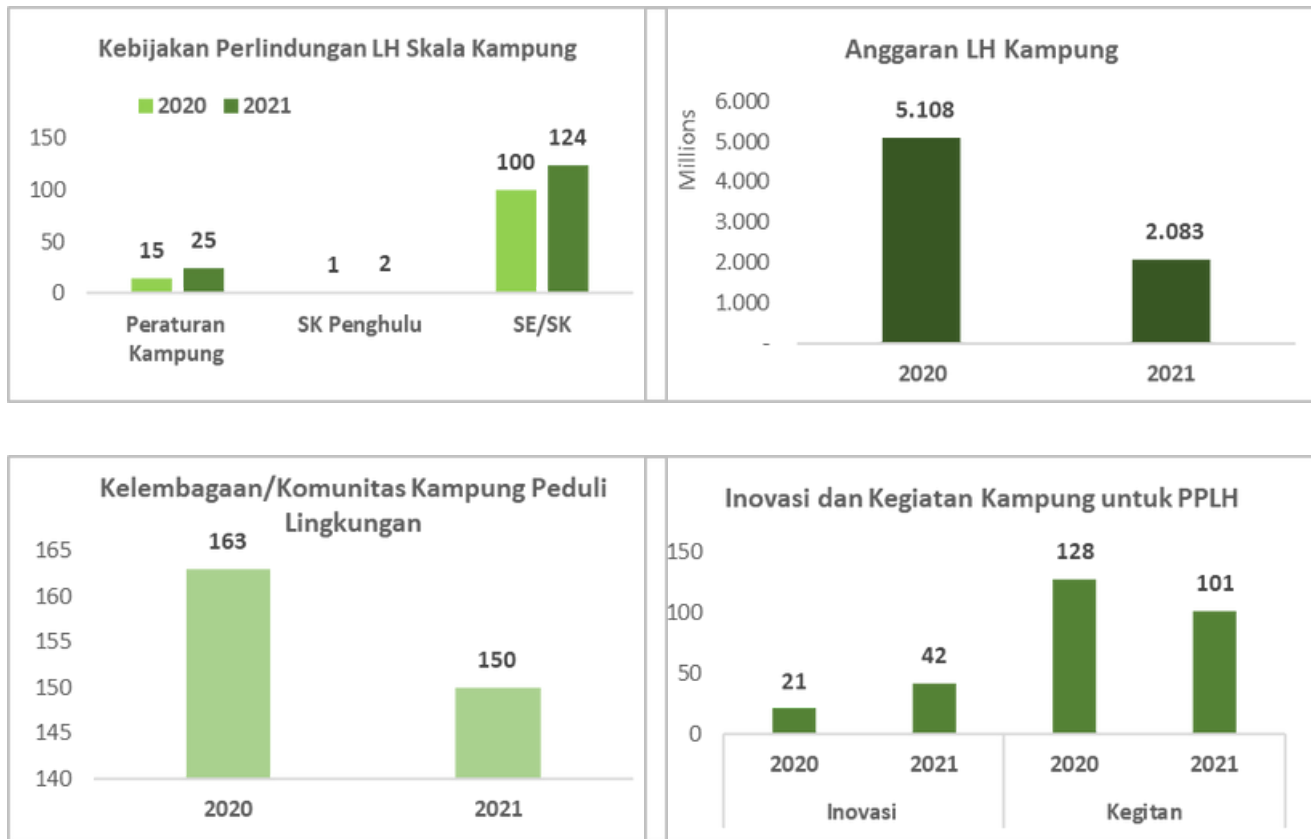
Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan;	Data PDRB Sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan). Data BPS (jutaan rupiah)	Rp 21.247.881,10
Meningkatnya pendapatan perkapita pertahun;	Pendapatan per- kapita Daerah	Rp 4.942.879
Peluang pengembangan industri hilir.	Data Potensi Pengembangan Industri Hilir	N/a

C. Dukungan Kampung Terhadap Siak Hijau

Melalui Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten berbasisi Ekologi (TAKE), Pemda Siak telah mengintegrasikan pembangunan Siak Hijau dengan pemerintah Kampung sejak tahun 2019-2021 yaitu dengan memberikan insentif fiskal kepada kampung yang berkinerja baik dalam mendukung siak hijau. Terdapat dua indikator kinerja kampung yang selaras dengan Siak Hijau yaitu; perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Peningkatan ekonomi dan penurunan Kemiskinan (PEPK), dengan indikator antara lain; kebijakan kampung, anggaran, kelembagaan dan inovasi kampung, serta pertumbuhan indeks desa membangun (IDM).

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Kampung Hijau dari tahun 2020-2021, terdapat peningkatan kinerja desa yang mendukung Riau Hijau, misalnya terdapat 151 kebijakan kampung untuk perlindungan lingkungan hidup, sekitar Rp. 7,1 Milyar anggaran kampung untuk kegiatan perlindungan lingkungan, 113 lembaga telah terbentuk bertujuan untuk perlindungan lingkungan dan terdapat 142 inovasi kampung dibidang lingkungan hidup. Sejak tahun 2019 hingga saat ini melalui assessment penilaian kinerja kampung hijau, kontribusi kampung untuk Siak Hijau dapat teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik. Perkembangan dukungan kampung untuk Siak Hijau dijelaskan dalam grafik dibawah ini.

Grafik; Dukungan Pemerintah Kampung terhadap Siak Hijau Berdasarkan Hasil Penilaian Indeks Kampung Hijau (IKD) Tahun 2020-2021



Bagian 4; Penutup

A. Kesimpulan

- Sejak berkalunya kebijakan Siak Hijau semakin mempertegas komitmen pemerintah daerah terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup, yang kemudian diimplementasikan melalui kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan teknis lainnya, serta dukungan anggaran yang semakin meningkat setiap tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2021. Dampak baik dari implementasi Siak Hijau selain dari meningkatnya upaya perlindungan lingkungan hidup, juga berdampak pada pemberdayaan dan peningkatan ekonomi, misalnya pengelolaan dan pengembangan produk industri skala kecil yang dikelola kelompok masyarakat setempat.
- Selanjutnya dampak dari dukungan program yang mendukung Siak Hijau, tentunya masyarakat setempat menjadi penerima manfaat langsung dari pelaksanaan program baik yang dilakukan oleh OPD, NGO dan privat sektor baik yang dilaksanakan di level kabupaten maupun di level desa, masyarakat kampung sebagai penerima dampak langsung program Siak Hijau. Namun, hingga berakhir periode rencana aksi Siak Hijau pada tahun 2021, belum semua para pihak melaporkan dukungan program dan kegiatannya sehingga tidak dapat berkontribusi terhadap pencapaian Siak Hijau.
- Capaian indikator Siak Hijau hingga akhir 2021 sebagian besar sudah tercapai dengan baik, namun ada beberapa rencana aksi yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan para pihak dikarenakan ada keterbatasan kewenangan pemerintah Kabupaten Siak, misalnya terkait pemberhentian alih fungsi lahan untuk hutan industri dan perkebunan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selain itu, beberapa rencana aksi yang tidak relevan dengan program kegiatan yang menyebabkan rencana aksi Siak Hijau tidak dapat dilaksanakan oleh OPD dan para pihak.
- Kontribusi kampung terhadap kebijakan Siak Hijau secara riil telah dilaksanakan sejak tahun 2019-2021 melalui pemberian insentif kinerja kampung hijau dalam kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE). Dukungan pemerintah kampung tersebut diukur dengan indeks kampung hijau terkait dengan kinerja perlindungan lingkungan hidup skala kampung dan upaya peningkatan ekonomi masyarakat kampung.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil monev Siak Hijau ini, rekomendasi yang harus dilaksanakan pemerintah daerah dan para pihak dalam mendukung Siak Hijau kedepan, diantaranya;

- Pemerintah Daerah melalui 12 OPD dalam penyusunan rencana strategis dan rencana program dan penetapan indikator kinerja harus selaras dengan arah kebijakan Siak Hijau sesuai mandate Perda No. 4 Tahun 2022 tentang Siak Kabupaten Hijau;
- Para Pihak baik NGO maupun privat sektor dalam melaksanakan program kegiatannya perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui Tim Sekretariat Siak Kabupaten Hijau (TKSKH) sehingga dukungan program kegiatan untuk pencapaian Siak Hijau kedepan semakin terkonsolidasi dan terdokumentasi dengan baik.
- Peluang-peluang kerjasama para pihak kedepannya perlu ditingkatkan, misalnya dukungan dari pemerintah pusat dan Provinsi Riau untuk percepatan implementasi Siak Hijau, khususnya terkait urusan yang bukan kewenangan Kabupaten Siak.

